

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN DI MASA PANDEMI  
(Studi di Kelurahan Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik**



**OLEH:**

**SARISWANTO A. PATEDUK**

**2017210140**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2021**

## **RINGKASAN**

Kemiskinan masih jadi permasalahan sosial yang membebani pemerintah baik ditingkat pusat ataupun wilayah. Kemiskinan ialah kasus yang lingkungan serta sudah jadi kasus sosial yang susah buat diatasi. Kemiskinan pula jadi perihal yang mendasari timbulnya bermacam kasus sosial lain di masyarakat semacam angka kriminalitas yang bertambah, sumber energi manusia yang menyusut, dan tingkatan pengangguran yang bertambah. Oleh sebab itu, kemiskinan juga diucap selaku pangkal dari kejahatan. Sebab terdesak oleh kebutuhan yang harus dipadati dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada, terkadang menimbulkan orang-orang miskin melaksanakan jalur pintas dengan melaksanakan tindak kriminal semacam pencurian, perampokan, pengedar narkoba sampai pembunuhan buat penuhi kebutuhannya. Sehingga diperlukan program kebijakan oleh pemerintah wilayah ataupun pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, serta Pandemi Covid-19**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih jadi permasalahan sosial yang membebani pemerintah baik ditingkat pusat ataupun wilayah. Tubuh Pusat Statistik( BPS, 2020) mencatat kalau terdapatnya kenaikan tingkatan kemiskinan selama 3 tahun terakhir pada tahun 2018 sampai 2020. Lebih lanjut, BPS( 2020) mencatat kalau Jawa Timur hadapi peningkatan angka tingkatan kemiskinan sebesar 0, 89 persen dari tahun 2019 disebabkan pandemi Covid- 19 yang terus menyerang penjuru negara di tahun 2020 ini. Pada Maret 2020, BPS( 2020) mencatat jumlah penduduk miskin di Jatim menggapai dekat 4, 41 juta jiwa, meningkat sebesar 363, 1 ribu jiwa dibanding dengan keadaan September 2019 yang tercatat 4, 05 juta jiwa. Bersumber pada informasi tersebut membuktikan kalau permasalahan kemiskinan bersifat multidimensi, yang maksudnya kemiskinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Kemiskinan ialah kasus yang lingkungan serta sudah jadi kasus sosial yang susah buat diatasi. Kemiskinan pula jadi perih yang mendasari timbulnya berbagai permasalahan sosial lain di masyarakat seperti angka kriminalitas yang bertambah, sumber energi manusia yang menyusut, dan tingkatan pengangguran yang bertambah. Oleh sebab itu, kemiskinan juga diucap selaku pangkal dari kejahatan. Sebab terdesak oleh kebutuhan yang harus dipadati dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada, terkadang menyebabkan orang- orang miskin melaksanakan jalur pintas dengan melakukan tindak kriminal semacam pencurian, perampokan, pengedaran narkoba hingga pembunuhan buat penuhi kebutuhannya. Sehingga diperlukan program kebijakan oleh pemerintah wilayah ataupun pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Program Pengentasan kemiskinan jadi salah satu kebutuhan berarti dimana kasus kemiskinan telah tidak bisa lagi ditunda serta jadi prioritas pembangunan jangka pendek, menengah serta jangka panjang oleh Undang- undang Bawah Negeri Republik Indonesia 1945 buat membagikan keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia hingga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negara No 53, dan Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 yang menunjang program pengentasan kemiskinan di wilayah miskin serta tertinggal. Perihal ini jadi komitmen bersama pemerintahan pusat serta wilayah secara terstruktur serta sistematis dalam merencanakan kebijakan keberlanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Riset seragam dicoba buat memandang lebih lanjut akibat program pengentasan kemiskinan yang dicoba oleh pemerintah berbeda wilayah satu dengan yang yang lain. Istiana Hermawati (2015; 143- 165) dalam riset yang bertajuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jayapura menciptakan kalau implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dicoba oleh pemerintah wilayah pada dikala itu membagikan akibat yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi, sosial serta budaya dalam kehidupan subjek riset. Berbanding lurus dengan riset yang dicoba oleh Sutriyadi( 2020; 57- 73) yang melaksanakan riset dengan judul implementasi kebijakan

Pemerintahan Wilayah Kota Batu dalam usaha pengentasan kemiskinan. Bersumber pada riset tersebut menciptakan kalau implementasi kebijakan yang dicoba oleh pemerintah wilayah Kota Batu secara signifikan berakibat pada kemajuan sumber daya manusia, tingkatan pembelajaran dan kesejahteraan sosial warga Kota Batu.

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dicoba oleh pemerintah. Cocok peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 menerangkan kalau PKH ialah salah satu dorongan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah terhadap keluarga miskin yang sudah terdaftar dalam informasi terpadu. PKH mempunyai proses pendataan dengan mencermati dorongan sosial dalam aspek kesehatan, pembelajaran serta kesejahteraan sosial. Riset yang dicoba oleh Oktaviani (2019) membuktikan kalau PKH dialami efisien dalam pengentasan kemiskinan, hendak namun mempunyai bermacam permasalahan yang belum lumayan maksimal dalam implementasinya. Senada dengan riset yang dicoba oleh Tirani (2018; 1- 9) yang melaksanakan riset terpaut implementasi kebijakan PKH di Dinas Sosial Kabupaten Poso menciptakan riset kalau dalam implementasi kebijakan yang dicoba oleh pemerintah ada hambatan dari aspek komunikasi, sumber energi, disposisi dan birokrasi.

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun wilayah memerlukan penilaian kebijakan secara mendalam buat mengenali lebih lanjut progress kebijakan yang sudah dilaksanakan. Sehingga dirasa butuh menyamakan riset lebih dahulu terpaut implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan satu dengan yang yang lain. Alasan heterogenitas kebijakan paling utama terpaut dengan implementasinya misalnya, integrasi pemerintah wilayah serta pusat sebagai pembentuk kebijakan, warga sebagai penerima akibat dari kebijakan dan wujud program kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tetapi dalam riset ini periset berkomentar kalau, walaupun nampak agak susah, tetapi memperbandingkan kinerja program pengentasan kemiskinan senantiasa membolehkan buat dicoba. Perihal itu mengingat kalau tujuan utama dari tiap kebijakan pengentasan kemiskinan siapapun pelaksanaannya merupakan sama, ialah menjamin livelihood, meningkatkan kesejahteraan dan melahirkan kemandirian orang miskin.

Perbandingan bermacam program kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia membuktikan kalau ada sebagian kesamaan kriteria yang bisa diperbandingkan, utamanya dari aspek input terpaut dengan informasi, pengelolaan dana, dan kelengkapan program. Aspek proses program pengentasan kemiskinan berkaitan pula dengan manajemen waktu yang dibutuhkan buat pengentasan kemiskinan dan bayaran pengelolaan, dan aspek output terpaut dengan ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran serta kemudahan untuk penerima program. Penulis berasumsi kalau ada homogenitas yang lumayan pada kategori- kategori tersebut, hingga sangat membolehkan buat mengevaluasi serta memperbandingkan implementasi program- program pengentasan kemiskinan yang dicoba oleh pemerintah khususnya pemerintah wilayah Kota Batu. Sehingga dengan demikian hendak diperoleh data yang lumayan kokoh selaku bawah dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan integratif yang sangat dibutuhkan dalam mengalami kemiskinan yang memiliki kepribadian multidimensi serta antargenerasi ini. Bersumber pada pemaparan latar balik diatas, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset mendalam terpaut“

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan (Program Keluarga Harapan) Kota Batu.”

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang di atas hingga penulis merumuskan permasalahan selaku berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan di masa pandemi di Kelurahan Sukoharjo.?
2. Bagaimana aspek pendukung serta penghambat implementasi kebijakan program keluarga harapan di masa pandemi di Kelurahan Sukoharjo.?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengenali serta menganalisis implementasi kebijakan program keluarga harapan di masa pandemi di Kelurahan Sukoharjo.
2. Untuk mengenali serta menganalisis aspek pendukung serta penghambat aspek pendukung serta penghambat implementasi kebijakan program keluarga harapan di masa pandemi di Kelurahan Sukoharjo.

## **1. 4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

riset ini bisa jadi keragaman khasanah ilmiah sehingga bisa menguasai secara langsung aplikasi teoritis yang sepanjang ini dipelajari dalam Akademi Besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2018. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics an Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princetos University Press

Creswell. 2015. *Riset Perencanaan, Dan Evaluasi Riset Kualitatif Dan Kuantitatif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irawan, Prasetya. 2015. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Islamy, Irfan. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara: Jakarta

Kadji, Yulianto. 2016. *Kemiskinan dan Komnsep Teoritismya*. Yogyakarta: Media Pustaka

Moleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2015. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Edisi Pertama*. Jakarata: Elex Media Komputindo, Jakarta

Winarno. 2018. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Ripley, Randall. B. and Grace A. Franklin.1986.*Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition. Chicago-Illionis: The Dorsey Press

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **UU/ Aturan Per UU**

Permendesa PDTT No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

*PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2020* tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya.

### **Jurnal**

Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan. 2018. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10, No. 2; 64-74*.

Oktaviani., Resy., dan Fatmariza. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan. *Jurnal Civic Education Vol. 1, No. 2; 43-62*.

Prasetyani, Andini Nurul. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.

Tirani, Oktavia. 2017. Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso. *Jurnal Katalogis Vol. 5, No. 6; 21-53*.